

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Peristiwa politik bulan Mei 1998 yang mendadak terjadi di Indonesia ditandai oleh mundurnya Presiden Soeharto yang selama 32 tahun berkuasa telah tumbang. Dan digantikan oleh BJ. Habibie yang menghadapi sejumlah tantangan berat di bidang politik. Disamping harus mengawasi krisis ekonomi yang tidak kunjung berakhir. Pemerintah Habibie dihadapkan pada masalah-masalah sosial politik dan hukum yang merupakan efek lanjutan dari transisi kepemimpinan nasional yang tidak normal. Sehingga untuk mendapatkan legitimasi politik, pemerintahan Habibie didesak untuk segera melaksanakan agenda reformasi dengan cepat dan menyeluruh di segala bidang aspek kehidupan. Kemudian untuk menciptakan iklim politik yang bebas seperti selayaknya terjadi pada setiap negara demokratis, termasuk yang berdemokrasi Pancasila. Maka dari itu Presiden BJ. Habibie dalam menunjukkan kesungguhannya melaksanakan reformasi dan memasyarakatkan demokrasi serta memulihkan kepercayaan dalam dan luar negeri segera melakukan perubahan-perubahan.
- Sebagai akibat dari tuntutan reformasi akhirnya Habibie mengeluarkan perintah untuk menghapus KKN, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemisahan dirinya dari keluarga cendana menjatuhkan/mengeluarkan anak-anak Soeharto dari jabatan penting,

Perancangan Undang-Undang Mengenai Pemilu serta Undang-Undang lainnya, pencabutan keputusan Menteri Penerangan No. 1/1984 yang menyangkut pembatasan dan pemerinta terhadap liputan pers, pembebasan tapol dan napol juga tidak ada larangan untuk mendirikan partai baru dan sebagainya.

B. SARAN

- Tuntutan reformasi mempunyai alasan kuat. Supaya tidak terjerumus kembali ke dalam sistem kehidupan yang hendak direformasi, maka haruslah dipastikan bahwa tujuan dan cara mencapainya adalah demokratik. Apalagi demokrasi itu sendiri mempunyai alasan yang kuat pula untuk diterapkan.
- Tindakan-tindakan yang diambel Presiden Habibie memang merupakan satu aspek kebijakan politik pemerintah dalam menciptakan ruang politik yang handal pada era reformasi dan demokratisasi. Namun, semua itu belum bisa mencerminkan keadaan sebenarnya jika tidak mengikuti perkembangan kekuatan politik di Indonesia yang menjadi komponen penting bagi kehidupan politik.